



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

**JALAN BHAYANGKARA NO 54
KOTA SAMARINDA,
KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Peran pemerintah bersifat stimulus atau penguangkit khususnya dalam rangka revitalisasi pertanian untuk mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan, sehingga perkembangan peternakan tidak terlepas dari peran serta masyarakat peternakan sebagai pelaku usaha. Untuk itu diperlukan rencana kerja yang sinergi dan difasilitasi oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur, terutama dalam upaya kecukupan daging dan penyediaan komoditas peternakan lainnya, pemberdayaan ekonomi pedesaan serta memanfaatkan peluang pasar komoditas peternakan.

Samarinda, Juni 2023
Kepala Dinas,



Fahmi Himawan, S.T., M.T
Pembina Tingkat I

NIP. 19741216 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	6
2.2 Gambaran Tupoksi dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	25
2.2.1 Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	25
2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	26
2.2.3 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.3.1 Permasalahan	32
2.3.2 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	44
2.3.3 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat	45
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.....	58
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ...	59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	86
BAB III.....	92
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	92
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	92

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	94
3.2.1 Tujuan.....	94
3.2.2 Sasaran Renja	95
3.3 Program dan Kegiatan	95
3.3.1 Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.....	95
3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan	96
BAB IV.....	103
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	103
BAB IV.....	127
P E N U T U P.....	127
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	6
Tabel 2 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2013 s/d 2022	24
Tabel 3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Pernakan Tahun 2022.....	28
Tabel 4 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	28
Tabel 5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2022	29
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2022 dan 2021	29
Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	31
Tabel 8 Pengadaan Ternak Tahun 2013-2022	31
Tabel 9 Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton)	51
Tabel 10 Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton).....	53
Tabel 11 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)	53
Tabel 12 <i>Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN</i>	54
Tabel 13 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022...	55
Tabel 14 Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan	59
Tabel 15 Review Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024.....	60
Tabel 16 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	86
Table 17 Usulan Langsung (Aspirasi) Kabupaten/Kota Tahun 2024	88
Table 18 Usulan Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2023	89
Tabel 19 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	94
Tabel 20 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	95
Table 21 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	104

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode 2024-2026 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Tahun 2024 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Rencana Kerja yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- b. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari misi, tujuan, sasaran dan program kegiatan dan sub kegiatan perenagkat daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024
- d. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan Rancangan Renja hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang – bidang di rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program/kegiatan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kaltim Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Renja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan akhir renja Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangaunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat at Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat at Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					158.664.134.300					48.394.328.927		44.885.439.675		92,75		
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82	%	104.674.727.782	80,00	83,00	103,75	81,00	30.787.928.745	81,00	28.422.396.622	100	92	81	99
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,30	Nilai	4.673.100.000	79,10	76,17	96,30	79,20	1.104.849.500	77,60	1.054.176.144	98	95	78	98
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,00	%	57.123.915.293	80,00	82,83	103,54	80,00	17.489.160.195	83,37	15.988.205.277	104	91	83	104

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K		Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,00	%	2.265.210.000	80,00	64,04	80,05	80,00	339.359.000	79,92	281.271.022	100	83	80	100
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	%	8.881.963.318	80,00	80,00	100,00	80,00	2.014.661.686	83,54	1.905.377.330	104	95	84	104
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,00	%	8.819.421.720	80,00	80,00	100,00	80,00	2.108.186.000	85,05	1.793.830.000	106	85	85	106
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,00	%	14.273.815.877	80,00	80,00	100,00	80,00	5.507.633.400	86,36	5.372.114.817	108	98	86	108
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,00	%	8.637.301.574	80,00	73,33	91,66	80,00	2.224.078.964	82,42	2.027.422.032	103	91	82	103

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	22	%	29.009.748.518	21	19	93	21,00	4.748.114.838	21,00	3.458.041.537	100	73	21	95
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	151	Unit usaha	2.496.000.000	0	0	0	75,00	624.011.600	75,00	605.737.442	100	97	75	50
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi Ternak Sapi Bibit	155	Ekor	3.462.106.264	10	56	560	65,00	541.233.338	65,00	482.432.796	100	89	121	78
		Produksi HPT (Segar)	2.375	Ton		750	1075	143	800,00		896	112		1971	83	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	6,50	Bulan	6.452.630.000	17	17	100	17,00	817.443.600	17,02	790.914.461	100	97	17	103
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	120	Sampel	3.642.305.500	40	40	100	40,00	456.602.200	40,00	411.437.120	100	90	80	67

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	32	Sampel	1.867.087.500	8	11	138	11,00	309.090.500	16,00	308.790.616	145	100	27	84
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	30	Kelompok	11.089.619.254	10	14	140	12,00	1.999.733.600	4,00	858.729.102	33	43	18	60
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	120	Unit	7.109.518.000	24	24	100	49,00	8.330.342.400	49,00	7.757.188.752	100	93	90	75
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	120	Unit	24.608.875.700	24	24	100	49,00	8.330.342.400	49,00	7.757.188.752	100	93	90	75
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70	%	11.501.140.000	50	50	100	60,00	3.536.488.100	60,00	3.371.501.850	100	95	60	86

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14	%		12	12	100	13,00		13,00		100		13	93
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10	Kab/Kota	2.081.100.000	10	9	90	10,00	676.339.000	10,00	658.829.885	100	97	10	100
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3	Check Point	2.623.340.000	1	1	100	2,00	1.497.265.000	2,00	1.318.334.410	100	88	2	67
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15	%	4.394.650.000	13	13	100	14,00	930.962.600	14,00	966.844.865	100	104	14	93

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	6	Unit Usaha	1.092.150.000	2	2	100	2,00	223.271.500	2,00	239.555.600	100	107	4	67
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	23	Unit Usaha	1.309.900.000	2	2	100	5,00	208.650.000	5,00	187.937.090	100	90	7	30
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75	%	2.389.800.000	25	25	100	50,00	510.354.844	50,00	1.398.278.748	100	274	50	67
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	90	Unit usaha	1.599.500.000	25	25	100	30,00	346.667.069	30,00	1.234.797.348	100	356	55	61
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	4	Rekomendasi	790.300.000	1	1	100	1,00	163.687.775	1,00	163.481.400	100	100	2	50
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	45	%	3.979.200.000	43	43	100	44	481.100.000	44,00	478.032.166	100	99	44	98
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12	Kali	1.760.000.000	12	12	100	12	247.360.000	12,00	246.632.834	100	100	12	100

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10,00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	65	Kelompok	2.219.200.000	20	20	100	20	233.740.000	20,00	231.399.332	100	99	40	62

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tersebut, disampaikan hasil program/kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 24.033.063.277 dari pagu anggaran Rp 26.252.667.085 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 91,55%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 81,10% dari target 81%. Realisasi skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan bersumber data pelayanan klinik hewan dan pelayanan vaksinasi, pelayanan expo pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, pelaku usaha dan peternak. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.054.176.144 dari pagu anggaran Rp 1.104.849.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,41%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja dengan realisasi kinerja 77,06 dari target 79,20.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 15.764.285.277 dari pagu anggaran Rp 17.247.000.195 dengan rata-rata capaian keuangan 91,4%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 150.963.892 dari pagu anggaran Rp 188.884.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 79,92%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 64% dari target 80%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.399.405.771 dari pagu anggaran Rp 1.504.807.200 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 93%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.350.030.00 dari pagu anggaran Rp 1.630.012.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 83,56%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 3.043.193.320 dari pagu anggaran Rp 3.146.905.076 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,7%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.271.008.873 dari pagu anggaran Rp 1.444.645.114 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 87,98%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 70% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terealisasi Rp 2.975.608.741 dari pagu anggaran Rp 4.206.881.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 70,73%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 21% dari target 21% atau setara dengan 25.535 ekor. Program penyediaan dan

pengembangan sarana pertanian terdiri dari 5 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 605.737.442 dari pagu anggaran Rp 624.011.600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,07%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan dengan realisasi 75 unit usaha dari target 75 unit usaha.

b. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 790.914.461 dari pagu anggaran Rp 817.443.600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,75%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah calving interval dengan realisasi indikator kinerja sebesar 17,2 bulan dari target 17 bulan. Calving Interval (CI) adalah jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya pada ternak betina. Jarak kelahiran (CI) merupakan salah satu ukuran produktifitas ternak sapi untuk menghasilkan pedet dalam waktu yang singkat.

c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 411.437.120 dari pagu anggaran Rp 456.602.200 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,11%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 40 sampel dari target 40 sampel.

d. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

Kegiatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 308.790.616 dari pagu anggaran Rp 309.090.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,9%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 16 sampel dari target 11 sampel.

e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 858.729.102 dari pagu anggaran Rp 1.999.733.600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 42,94%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok penerima ternak dengan realisasi indikator kinerja 4 kelompok dari target 12 kelompok.

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 7.757.188.752 dari pagu anggaran Rp 8.330.342.400 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 93,12%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah jumlah miniranch yang teregister dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 49 unit dari target 49 unit. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari dua kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 7.757.188.752 dari pagu anggaran Rp 8.330.342.400 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 93,12%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah miniranch sapi potong dengan realisasi kinerja 49 unit dari target 49 unit. Lokasi mini ranch sapi potong tahun 2022 terdiri dari Kabupaten Berau 7 kelompok, Kutai Barat 6 kelompok, Kutai Kartanegara 12 Kelompok, Kutai Timur 5 kelompok, Penajam Paser Utara 4 kelompok, Mahakam Ulu 2 kelompok, Paser 9 Kelompok, Kota Bontang 1 Kelompok, Balikpapan 2 kelompok, dan Samarinda 1 kelompok

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terealisasi Rp 2.404.656.985 dengan pagu anggaran Rp 2.605.525.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 92,29%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:

- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan

realisasi kinerja program sebesar 60% dari target 60%. wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Samarinda

- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 13% dari target 13%. unit usaha yang sudah terbit sertifikasi NKV sebanyak 6 unit usaha dari target 6 unit usaha. Adapun daftar unit usaha tersebut sebagai berikut:
 1. PT Bumi Mulia Sentosa Abadi
 2. PT Matahari Putra Prima Tbk
 3. PT Laris Manis Utama
 4. Farmer Market Samarinda
 5. PT Agro Boga Utama
 6. PT. Perfect Companion Indonesia

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari lima kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 658.829.885 dari pagu anggaran Rp 676.339.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,41%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 10 kab/kota dari target 10 kab/kota. wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI terdiri dari Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Bontang, Samarinda

- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.318.334.410 dari pagu anggaran Rp 1.497.265.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 88,05%. Indikator kinerja kegiatan tersebut

adalah Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 2 checkpoint dari target 2 checkpoint. Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan yaitu check point muara komam dan batu engau di Kabupaten Paser.

c. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 239.555.600 dari pagu anggaran Rp 223.271.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 107,29%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dengan realisasi kinerja sebanyak 2 unit usaha dari target 2 unit usaha. unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yaitu PT. Laris Manis Utama di Samarinda dan PT. Supra Boga Lestari Tbk. di Samarinda

d. Kesejahteraan Hewan

Kegiatan kesejahteraan hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp. 187.937.090 dari pagu anggaran Rp 208.650.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,07%. Realisasi keuangan yang besar ini dikarenakan pagu anggaran pada kegiatan tersebut mengalami kenaikan pada saat proses penganggaran. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 5 unit dari target 5 unit usaha

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program perizinan usaha pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.398.278.748 dari pagu anggaran Rp 510.354.844 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 273,98%. Indikator kinerja program tersebut adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha dengan realisasi kinerja sebesar 50% dari target 50%. Unit usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha terealisasi 1 unit usaha. Program perizinan usaha pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.234.797.348 dari pagu anggaran Rp 346.667.069 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 356,19%. Indikator kinerja kegiatan tersebut

adalah jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan dengan realisasi kinerja sebanyak 30 unit usaha dari target 30 unit usaha.

b. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Kegiatan penerbitan izin usaha pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 163.481.400 dari pagu anggaran Rp 163.687.775 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 40,62%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 1 rekomendasi dari target 1 rekomendasi. rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan diberikan kepada PT. Romindo Primavetcom

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 478.032.166 dari pagu anggaran Rp 481.100.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,36%. Indikator kinerja program tersebut adalah Cakupan binaan kelompok ternak dengan realisasi sebesar 44% dari target 44%. Cakupan binaan kelompok ternak sebesar 44% setara dengan 762 kelompok yang telah dibina dari target kelompok peternak 1.798 kelompok. Program penyuluhan pertanian terdiri dari dua kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 246.632.834 dengan pagu anggaran Rp 247.360.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,71%. Indikator kegiatan tersebut adalah jumlah informasi penyebaran informasi peternakan dengan realisasi kinerja sebanyak 12 kali dari target 12 kali.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 231.399.332 dari pagu anggaran Rp 233.740.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok ternak yang teregistrasi dengan realisasi kinerja sebanyak 20 kelompok dari target 20 kelompok.

B. UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2.554.166.331 dari pagu anggaran Rp 2.635.702.062 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,91%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 81,10% dari target 81%. Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan data bersumber dari pelanggan atau masyarakat yang melakukan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 115.080.000 dari pagu anggaran Rp 121.440.000 dengan rata-rata capaian keuangan 94,76%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 95.786.280 dari pagu anggaran Rp 114.425.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 83,71%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 251.658.136 dari pagu anggaran Rp 254.556.086 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 98,86%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.438.088.793 dari pagu anggaran Rp

1.461.611.776 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 98,39%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 653.553.122 dari pagu anggaran Rp 683.669.200 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,59%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terealisasi Rp 482.432.796 dari pagu anggaran Rp 541.233.338 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 89,14%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 21% dari target 21%. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 482.432.796 dari pagu anggaran Rp 541.233.338 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 89,14%. Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari dua indikator yaitu:

- Indikator kinerja Populasi ternak sapi bibit sampai dengan triwulan IV 65 ekor dari target 65 ekor
- Indikator kinerja produksi HPT segar sampai dengan triwulan IV 896,33 Ton dari target 800 ton/tahun

C. UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1.835.167.014 dari pagu anggaran Rp 1.899.559.598 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,61%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 81,10% dari target 81%. Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan data bersumber dari pelanggan atau masyarakat yang melakukan pengujian sampel baik sampel pengujian hewan dan produk hewan ke UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 108.840.000 dari pagu anggaran Rp 120.720.000 dengan rata-rata capaian keuangan 90,16%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 90,16% dengan target 80%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 34.520.850 dari pagu anggaran Rp 36.050.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,76%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 95,76% dari target 80%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 254.313.423 dari pagu anggaran Rp 255.298.400 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,61%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 99,62% dari target 80%

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 443.800.000 dari pagu anggaran Rp 492.610.000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,09%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 90,09% dari target 80%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 890.832.704 dari pagu anggaran Rp 899.116.548 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,08%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 99,08% dari target 80%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 102.860.037 dari pagu anggaran Rp 95.764.650 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 107,41%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 97,26% dari target 80%
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 966.844.865 dengan pagu anggaran Rp 930.962.600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 103,85%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:
- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 60% dari target 60%. wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Samarinda.
 - Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar

13% dari target 13%. unit usaha yang sudah terbit sertifikasi NKV sebanyak 6 unit usaha dari target 6 unit usaha.

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner didukung dengan kegiatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan dengan Indikator kinerja kegiatan tersebut peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan dengan realisasi kinerja kegiatan sebesar 14% dari target kinerja 14%

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur selain bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga bersumber dari dana APBN yang berasal dari kegiatan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pengalokasian berupa Tugas Pembantuan. Dukungan anggaran APBD dan APBN sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2013 s/d 2022

No.	Tahun Anggaran	APBN Ditjen PKH & PSP Tugas Pembantuan (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2013	35.086.258.000 Realisasi 96,03%	72.318.668.123 Realisasi 94,53%	107.404.926.123
2.	2014	30.764.230.000 Realisasi 73,79%	67.517.958.263,50 Realisasi 94,80%	98.282.188.263,50
3.	2015	307.682.215.000 Realisasi 46,28%	80.919.778.040 Realisasi 74,52%	388.601.993.040
4.	2016	25.083.899.000 Realisasi 91,63%	59.605.749.228 Realisasi 94,59%	81.466.766.834
5.	2017	8.332.948.000 Realisasi 90,00%	20.299.891.000 Realisasi 90,68%	28.622.839.000
6.	2018	3.413.441.000 Realisasi 94,86%	22.157.153.540,07 Realisasi 96,39%	25.570.594.540,07
7.	2019	7.156.453.000 Realisasi 96,61%	46.903.080.000 Realisasi 91,99%	54.059.533.000
8.	2020	4.133.774.000 Realisasi 95,29%	46.634.207.724 Realisasi 90,21%	50.767.981.724
9.	2021	4.708.807.000 Realisasi 97,04%	59.575.683.770 Realisasi 81,38	64.284.490.770
10.	2022	7.987.573.000 Realisasi 88%	49.294.328.927 Realisasi 91,06%	57.281.901.927

Dana APBN merupakan akumulasi Anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Tahun anggaran 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.294.328.927 termasuk belanja langsung dan tidak langsung. Realisasi keuangan selama tahun 2022 mencapai 91,06% atau sebesar Rp 44.885.439.675. Sedangkan realisasi fisik sebesar 94,68%. Realisasi keuangan tersebut merupakan perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

2.2 Gambaran Tupoksi dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas berisi tentang pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

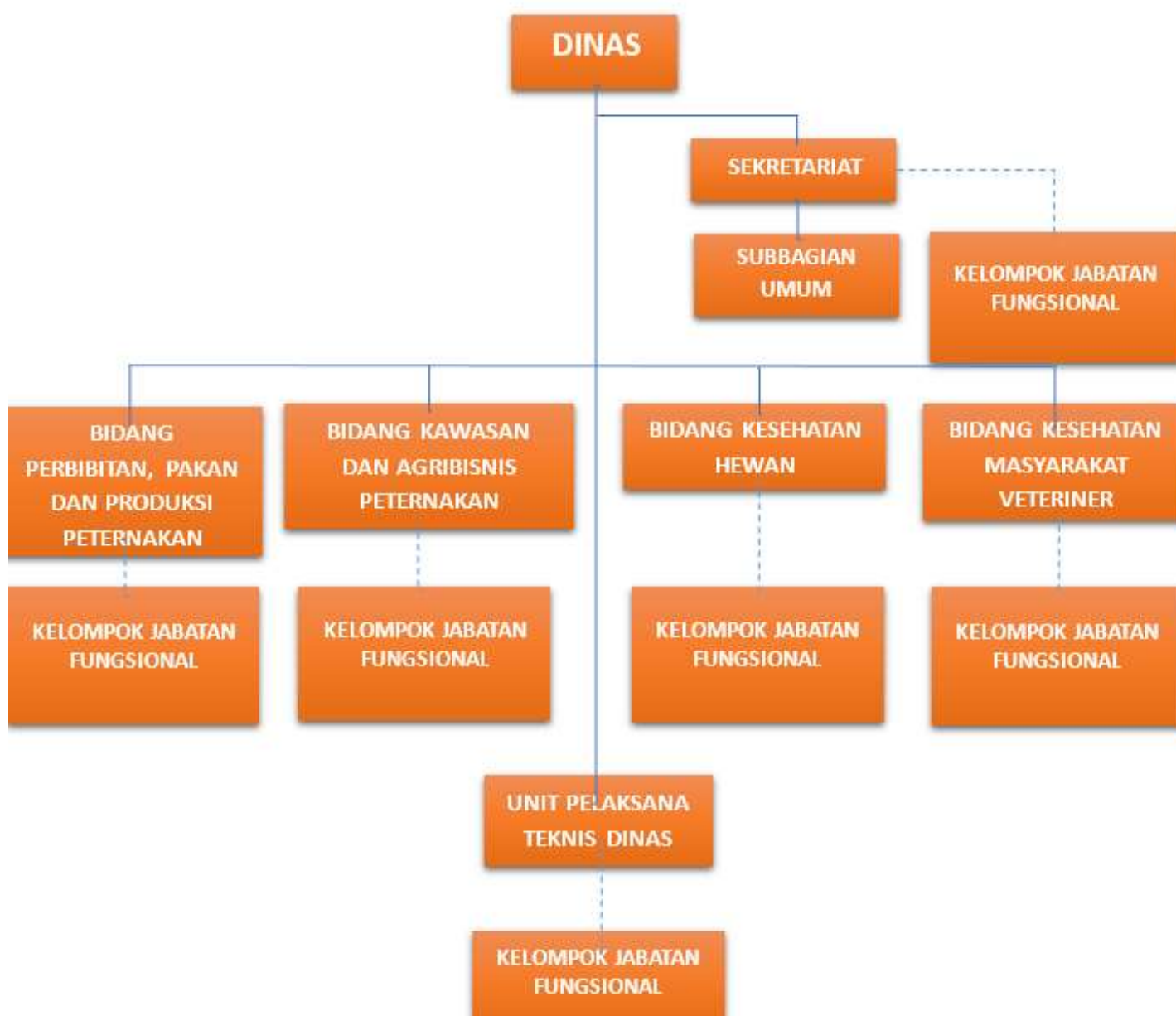
2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan::
 - a. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan yaitu:
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
6. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
 - c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Gambar Bagan berikut**



2.2.3 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

Indikator:

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	103	108,04	104,89

Pada tahun 2022 indeks yang diterima petani sebesar 121,31 dan indeks yang dibayarkan petani sebesar 112,28 sehingga diperoleh NTP tahun 2022 sebesar 108,04. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat tinggi, karena capaian kinerja mencapai 104,89% artinya sepanjang tahun 2022 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

Tabel 4 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		%
			2021	2022	Peningkatan/Penurunan Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	104,27	108,04	104,89

Pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan NTP Peternakan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dari 104,27 menjadi 108,27 atau meningkat sebesar 3,49%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk hasil peternakan. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir nilai NTP peternakan paling tinggi pada tahun 2019 mencapai 110,95 dan paling rendah pada tahun 2020 mencapai 101,65. Penurunan nilai NTP peternakan ini akibat dari Pandemic Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan produk hasil peternakan sehingga produksi produk peternakan cenderung menurun. Pada Tahun 2022 Peningkatan 3,49% menandakan kembali mulai stabil permintaan produk hasil peternakan setelah masa pandemi.

Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya produksi pangan asal hewan

Indikator:

1. Produksi Daging

2. Produksi Telur

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	74.740,23	74.461,03	99,63
2	Produksi Telur	Ton	14.290,14	14.834,64	103,81
Capaian Kinerja Sasaran 2					101,72

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata produksi daging dan telur mencapai 101,72% yaitu produksi daging sebesar 99,63% dan telur sebesar 103,81%.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2022 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	75.811,96	74.461,03	-1,78
2	Produksi Telur	Ton	13.181,14	13.834,64	12,54

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa produksi daging mengalami penurunan sebesar 1.350,93 ton (1,78%) dari 75.811,96 ton menjadi 74.461,03 sedangkan untuk produksi telur mengalami peningkatan sebesar 12,54% atau sebanyak 1.653,50 ton dari 13.181,14 ton menjadi 14.834,64.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 74.461,03 ton mengalami penurunan sebesar 1,78% dari tahun 2021 yaitu 75.811,95 ton. Hal ini disebabkan adanya wabah penyakit hewan nasional yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia di daerah sumber ternak untuk Provinsi Kalimantan Timur.

PMK mulai memasuki Kalimantan Timur pada awal bulan juni di Kabupaten Paser sehingga Pengadaan ternak dari luar Provinsi tidak dapat dilakukan dan merujuk Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 14213/KR.120/K/0/2023 tanggal 28 Mei 2022 tentang Perubahan Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 12950KR120/K/05/2022 tanggal 06 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana dijelaskan Pengaturan Terhadap Lalu Lintas HRP (Hewan Rentan PMK) bahwa Kalimantan Timur tidak dapat memasukkan ternak bibit dari luar provinsi.

Produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 83.665,07 ton per tahun sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih 35 mendatangkan daging maupun produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas dan kuantitas sapi induk masih rendah, jarak kelahiran sapi (calving interval) cukup panjang, dan tingkat kematian pedet cukup tinggi.

Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 14.834,64 ton/tahun sedangkan Konsumsi telur mencapai 26.809,03 ton/tahun. Produksi telur Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Sasaran Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104	104,5	102	102	102	102,54	104,27	108.04	102	
2	Produksi Daging (Ton)	82.811,60	85.479,70	73.274,74	74.740,23	76.235,08	80.917,96	75.811,96	74,461.03	76.235,08	
	Produksi Telur (Ton)	11.786,10	12.058,60	14.148,65	14.290,14	14.433,04	11.386,31	13.181,14	14,834.64	14.433,04	

PENGADAAN TERNAK

Pengadaan Ternak bibit setiap tahun cenderung meningkat baik bersumber dari Anggaran APBD maupun dari Anggaran APBN. Pengadaan ternak sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 dari anggaran APBD Provinsi dan anggaran APBN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Pengadaan Ternak Tahun 2013-2022

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
2013	Sapi Bibit	1.800	1478	82,11
	Sapi Bakalan	400	250	62,5
	Sapi Potong	1080	1080	100
	Sapi BC	175	175	100
2014	Sapi Bibit	1.580	1.580	100
	Sapi Bakalan	776	776	100
	Sapi Potong	195	195	100
2015	Sapi Bibit	483	483	100
	Sapi Bakalan	472	472	100
	Sapi Potong	200	200	100
	Babi	125	125	125
2016	Sapi BC	950	95	10
	Sapi Bibit	480	480	100
	Sapi Bakalan	50	50	100
	Sapi Potong	220	220	100
2017	Sapi PO	365	365	100
	Kambing	450	450	100
	Sapi Bali	25	25	100
	Itik	400	400	100
2018	Sapi Bali	115	115	100
2019	Sapi Jantan	15	15	100

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
	Pejantan Pemacek Sapi Bali	80	80	100
	Pemacek Brahman Cross	20	20	100
	Sapi Bali Jantan dan Betina	108	108	100
2020	Sapi Bali	368	368	100
2021	Sapi Bali	265	90	33,96
	Kambing	148	148	100
2022	Sapi Bali	116	24	20,69
	Kambing	175	175	100
	Ternak Itik	6.000	6.000	100
	Ternak Ayam	6.000	6.000	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Belum Optimalnya peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan adalah sebagai berikut:

2.3.1.1 Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan, Produksi dan Produktifitas Ternak Rendah;

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut. Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminansia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminasia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan kambing mengalami tren penurunan pada masing-masing -1,95%, -11,31% dan -3,09%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 9,97%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam buras, ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 3,21%, 6,15%, 2,01% dan 12,08%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -2,03%.

No.	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S a p i	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613	-1,95
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68	-11,31
3	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490	1,33
4	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.552	-3,09
5	Domba	439	590	635	694	642	9,97
6	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839	-12,71
7	Kuda	97	102	95	143	95	-0,52
8	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873	3,21
9	Ayam Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217	6,15
10	Ayam Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191	-2,03
11	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564	2,01
12	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931	-13,53
13	Puyuh	66.593	65.808	79.222	94.339	88.143	7,26
14	Merpati	4.027	4.776	5.015	5.375	5.678	8,97
15	Itik Manila	42.851	42.890	52.823	64.178	67.608	12,08

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pematangan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

- Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
- Rata-rata berat hidup sapi (Non BX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).
- Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28.84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017).

- Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- Calving interval rata-rata 19,6 bulan. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16- 17 bulan.

2.3.1.2 Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal

Introduksi teknologi maupun inovasi dalam bidang peternakan harus terus diupayakan untuk disosialisasikan kepada para petani dan peternak. Berbagai informasi teknologi dan inovasi terbaru yang telah dikembangkan hendaknya dapat diterapkan pada mitra (petani dan peternak) secara penuh dan berkelanjutan. Penerapan teknologi yang tepat dapat menjawab masalah Harga pokok Produksi (HPP) ternak di Kalimantan Timur. Meningkatnya Harga Pokok Produksi Ayam Pedaging Tahun 2012 hanya 13.500 /kg sedangkan Tahun 2022 menjadi 23.500 / kg atau naik 74%. (PINSAR, 2022) menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing produk peternakan di Kalimantan Timur.

Teknologi yang diterapkan untuk menekan HPP dapat berupa penerapan penggunaan kandang tertutup (Closed House System), Inovasi penggunaan bahan pakan baru seperti maggot, penggunaan pakan fermentasi dan teknologi Bank Pakan. Budidaya ayam padaging dan ayam petelur dipelihara menggunakan kandang sistem open house dan closed house, saat ini di teknologi pemeliharaan dengan kandang closed house di Kalimantan Timur sebanyak 45%.

2.3.1.3 Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400

Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijau mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijau ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

2.3.1.4 Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Permasalahan potensi komoditas ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Timur menjadi persoalan yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan potensi ternak lokal di Indonesia. Sehingga, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kurangnya akses pasar. Beberapa komoditas ternak lokal belum memiliki akses pasar yang luas sehingga peternak tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Keterbatasan teknologi dan informasi. Peternak seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal yang mereka miliki.
4. Tidak adanya dukungan keuangan. Peternak kecil dan menengah seringkali kesulitan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan bisnisnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat. Konsumen belum sepenuhnya menyadari potensi dan nilai dari komoditas ternak lokal sehingga masih lebih memilih komoditas ternak impor.

Kalimantan Timur memiliki potensi ternak lokal seperti Kerbau Kalimantan Timur (Kerbau kalang), Rusa Sambar, Ayam Nunukan dan Aneka Ternak, yang belum di manfaatkan dan di eksplorasi secara maksimal agar dapat menjadi usaha peternakan yang menguntungkan. Aneka ternak yang juga menjadi potensi adalah budidaya Burung Walet, Kelinci dan Lebah Kelulut. Setiap jenis ternak tersebut memiliki keunggulan dan layak untuk dikembangkan dalam mendukung

diversifikasi usaha peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.3.1.5 Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kejadian penyakit baru selain PMK yang harus diwaspadai adalah penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, dan Penyakit Lumpie Skin Deasease (LSD). Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kalimantan Timur kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceolosis.

Kejadian penyakit Avian Influenza (AI) meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 76 kasus dari Tahun 2021 sebanyak 5 Kasus, kejadian penyakit ASF meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 1.251 ekor dari Tahun 2021. sebanyak 784 ekor, dan PMK mulai terjadi Tahun 2022 sebanyak 123 ekor. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kalimantan Timur seperti Rabies, Salmonellosis, fasiolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedik dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut. Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

2.3.1.6 Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta

nomor registrasi sudah kadaluarsa. Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medik dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada disetiap kecamatan.

2.3.1.7 Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya penyakit hewan dari luar sehingga Kalimantan Timur menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab Karantina Pertanian, sedangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan prov. Kalimantan Timur hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat izin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak. Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point. Kegiatan penguatan check point di perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus baik SDM teknis, Sarana prasarana dan penguatan sistem.

2.3.1.8 Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan kualitas hasil peternakan baik yang bersifat zoonosis dan non zoonosis yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kemampuan Analisa hasil uji laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan

tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer.

Kondisi perkembangan kasus kejadian penyakit hewan saat ini begitu pesat, Seperti contoh Penyakit Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Diseases (LSD), kedua penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi sehingga dalam menentukan uji penyakit ini harus secara cepat dan akurat, sehingga segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan prosedur tetap. Dengan kondisi tersebut maka perlu peningkatan pelayanan dalam hal penambahan ruang lingkup uji maupun pengembangan sistem/metode pengujian sehingga deteksi penyakit akan lebih cepat dan akurat.

2.3.1.9 Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan asal hewan meningkat saat masa pandemic Covid-19, mulai dari daging dan telur ayam, daging sapi yang termasuk ke dalam pangan asal hewan. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, pangan asal hewan berpotensi dapat membahayakan manusia dan kemungkinan terkontaminasi cemaran biologis, kimia, dan zat yang membahayakan sangat tinggi.

Kesadaran tentang pentingnya kebutuhan protein hewani juga perlu didorong untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada anak/balita kasus stunting. Stunting memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan balita. Adapun dampak jangka pendeknya yaitu meningkatnya angka kesakitan dan kematian, dan adanya risiko bagi balita stunting menderita berbagai penyakit infeksi. Sementara dampak jangka panjangnya yaitu menurunnya kemampuan kognitif, dan rendahnya Intelligence Quotion (IQ) dan kapasitas fisik.

Kementrian Kesehatan menyatakan "bahwa protein hewani adalah instrumen gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah stunting pada anak", (<https://promkes.kemkes.go.id/protein-hewani-cegah-stunting>), kontribusi sub sektor peternakan sangat diperlukan dalam penanganan kasus stunting, selain itu dilakukan untuk upaya mewujudkan keamanan pangan di Kalimantan Timur adalah dengan menerapkan pola pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, halal), yaitu pangan yang bebas dari kontaminasi berbahaya (kontaminasi fisik, kimia atau biologis), memiliki nilai gizi yang tinggi, tidak tercampur bahan lain, dan diolah berdasarkan syariat Islam sehingga halal untuk dikonsumsi.

2.3.1.10 Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional. Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Surveillance pangan asal ternak terhadap cemaran mikroba, Bahan kimia dan spesies babi Tahun 2022 berturut-turut 57,23% dengan jumlah 636 sampel, 3% dengan jumlah 933 sampel, dan 1,23% dengan jumlah 486 sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pangan asal ternak perlu mendapatkan perhatian dalam keamanannya.

2.3.1.11 Pematangan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur

Sapi Betina Produktif merupakan sapi betina yang dinyatakan normal organ reproduksi/ peranakan yang dinyatakan oleh dokter hewan atau petugas peternakan. Sesuai dengan Dasar Hukum Larangan Pematangan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena

merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Akibat Pematangan sapi Betina produktif adalah terhentinya aktifitas produksi pedet (anak sapi) untuk regenerasi selanjutnya, Pematangan sapi betina produktif mengakibatkan penurunan populasi secara signifikan. Pematangan sapi betina di Kalimantan Timur termasuk relatif tinggi, walaupun masih perlu di konfirmasi apakah sapi tersebut sudah tidak produktif atau masih produktif.

Tingginya Pematangan sapi betina ini perlu dilakukan verifikasi bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif, dan dicarikan solusi atas ketersediaan stok sapi tersebut. Jika larangan Pematangan ternak betina produktif tetap dilanggar maka ada sanksi hukumnya dan ini berlaku pula untuk Pematangan ternak ruminansia kecil dengan ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pasal 86.

2.3.1.12 Terbatasnya Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan terkait alokasi kawasan peternakan yang memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya alokasi kawasan peternakan di Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya dukungan pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah Kota/Kabupaten, maka alokasi kawasan peternakan akan terbatas.
2. Keterbatasan lahan yang tersedia. Di Kalimantan Timur, lahan menjadi faktor pembatas dalam alokasi kawasan peternakan yang memadai. Jika lahan tidak cukup, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kawasan peternakan yang memadai, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas

peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan pewayahan komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

2.3.1.13 Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah

Akses pembiayaan untuk usaha peternakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan akses pembiayaan dalam usaha peternakan antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Banyak peternak yang tidak mengetahui produk pembiayaan yang tersedia untuk usaha peternakan sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan.
2. Ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan yang ketat dari lembaga pembiayaan seringkali sulit dipenuhi oleh para peternak, terutama bagi peternak yang baru memulai usahanya.
3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset yang cukup besar, dan hal ini seringkali menjadi kendala bagi peternak yang belum memiliki aset yang cukup besar.

2.3.1.14 Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah

Keterlibatan swasta dalam pembangunan peternakan di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang masih perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan swasta antara lain:

1. Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan.
2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya layanan

pendukung, seperti listrik, air, dan jalan yang baik, seringkali menjadi kendala bagi para investor swasta.

3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Tanpa adanya data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, para investor swasta cenderung enggan untuk berinvestasi.

Perusahaan peternakan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 unit di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan.

2.3.1.15 Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah

Masalah kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan yang masih rendah merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan antara lain:

1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan. Namun, kurangnya fasilitas dan program pelatihan dan pendidikan yang memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
2. Rendahnya kualitas kemampuan manajemen peternakan. Masalah manajemen peternakan yang buruk dapat menghambat perkembangan peternakan dan menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
3. Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Dukungan kelembagaan yang memadai, seperti asosiasi peternak atau kelompok tani, dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendukung pengembangan peternakan. Namun, kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai dapat

menghambat perkembangan peternakan dan mengurangi kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

Penurunan jumlah RTUP pada beberapa komoditas ternak menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat usaha terhadap komoditas tersebut dengan berbagai alasan diantaranya adalah minat generasi peternak terhadap usaha peternakan yang turun, kasus penyakit hewan, kelayakan usaha dan permasalahan terbatasnya lahan usaha untuk peternakan.

2.3.1.16 Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik lokal maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

Masalah fluktuasi harga komoditas ayam potong yang dapat memicu inflasi merupakan permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia, mengingat konsumsi ayam potong cukup tinggi di masyarakat Kalimantan Timur yaitu 79% dari total konsumsi daging. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas ayam potong antara lain:

1. Faktor musim dan cuaca. Harga ayam potong dipengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca, seperti peningkatan permintaan pada saat perayaan hari besar atau cuaca buruk yang mengganggu produksi peternakan ayam.
2. Kenaikan harga pakan ternak. Harga pakan ternak yang tinggi dapat membuat biaya produksi peternakan ayam meningkat dan berdampak pada kenaikan harga ayam potong.
3. Kondisi kesehatan ternak. Jika ada wabah penyakit ternak atau kondisi kesehatan ternak yang buruk, produksi ayam potong bisa menurun dan harga ayam potong bisa naik.
4. Ketergantungan terhadap impor. Indonesia masih mengimpor ayam potong dalam jumlah yang cukup besar. Jika terjadi kenaikan harga ayam potong di pasar internasional, maka harga ayam potong di dalam negeri juga bisa naik.

Untuk mengetahui secara mendalam dan detail maka diperlukan informasi Supply demand yang memadai akurat dan terpercaya, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Kolaborasi antar perangkat Dinas terkait pengendalian inflasi dan kenaikan harga sangat diperlukan, dengan lebih mendalam memahami kondisi stok barang, produksi lokal, pemasukkan dari luar daerah dan rantai distribusi yang menyebabkan dan faktor kenaikan harga

2.3.2 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2015 maka terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagian besar perangkat daerah lingkup pertanian yang ada digabung menjadi satu, bahkan ada yang digabung dengan kehutanan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Keterkaitan RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024-2026 dengan Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur.

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2021 – 2026 :“ Meningkatkan Produksi Pertanian Dan Peternakan Dengan Menerapkan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Menjadikan Petani Yang Kreatif, Inovatif, Dan Mandiri Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2021 – 2026 : “Mewujudkan Swasembada Dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan".

6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinerjis dan Berkelanjutan”.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2021 – 2026 :Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan pertanian Kota Bontang adalah : 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan; 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah misi nomor 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan tujuan nomor 1 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahulu Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

2.3.3 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :” Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat

penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat. Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubungantara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi padarantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan sertap engendalian dan penanggulangan zoonosis. P roduk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antarlain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.
Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.4.1 Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga Tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2024 – 2026.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam kurun waktu 2011-2022 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan Sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang

d. Konsistensi Penganggaran

Renstra yang telah disusun sudah memuat rencana penganggaran dalam satu periode lima Tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten penggaran tersebut dipenuhi sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah

2. Tantang Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan

permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.

- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal
- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan Pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kalimantan Timur bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat.

2.3.4.2 Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh penambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton)

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	10,961.24	12,444.65	10,694.27	9,924.65	7,091.87
2	K e r b a u	1,360.47	1,667.58	2,391.48	3,346.89	61.18
3	Kuda	0.18	0.63	1.81	1.36	0.29
4	Kambing	745.89	693.59	826.10	877.53	783.33
5	Domba	8.32	11.07	36.25	15.32	5.19
6	Babi	1,400.94	1,803.70	1,830.40	2,302.49	2,348.23
7	Ayam Buras	4,798.66	4,592.02	4,657.96	4,720.67	4,815.08
8	Ayam Petelur	452.21	365.77	522.29	629.19	641.77
9	Ayam Pedaging	63,028.77	69,243.31	60,372.41	65,702.56	54,830.23
10	I t i k	392.71	499.28	644.86	115.38	104.43
11	Kelinci	6.32	3.95	4.82	4.21	4.30
12	Puyuh	6.76	6.19	7.48	8.92	9.05
13	Merpati	1.05	1.25	1.31	1.40	1.43
14	Itik Manila	26.87	26.89	33.12	40.24	41.04
Jumlah		83.190,37	91.359,87	82.024,57	87.690,81	70.737,42

Pada Tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 Ton dibandingkan dengan Tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 Ton. Apabila dibanding dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,68% dan di Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 12.444,65 Ton atau sebesar 11,9%. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 Ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan sosial yang berdampak pada sektor peternakan dan keterbatasan pasokan daging serta kenaikan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah. Meskipun konsumsi daging mengalami penurunan pada Tahun 2020 hal ini kemungkinan bersifat sementara dan bisa kembali meningkat setelah pandemi berakhir dan perekonomian pulih kembali.

Berdasarkan data konsumsi daging pada tabel diatas dimulai Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 Tahun terakhir mencapai 69.243,31 Ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kalimantan Timur.

Pemenuhan konsumsi daging dalam rangka pembangunan IKN

Peningkatan kebutuhan daging pada pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- (1) Melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan daging yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi penghitungan terhadap jumlah penduduk yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara, pertumbuhan populasi yang diharapkan, preferensi konsumsi daging, serta kebutuhan daging untuk sektor-sektor tertentu seperti konstruksi dan tenaga kerja.
- (2) Peningkatan produksi dalam daerah (lokal Kalimantan Timur), yaitu dengan mendorong peningkatan produksi daging dalam daerah dari peternak-peternak lokal, termasuk peternakan sapi, kambing, domba, dan ayam, untuk meningkatkan jumlah ternak yang diproduksi. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui program-program pengembangan peternakan, peningkatan teknologi peternakan, pemenuhan pakan berkualitas, dan pengelolaan kesehatan hewan yang baik.
- (3) Peningkatan produktifitas perlu juga dilakukan, hal ini dapat dicapai melalui seleksi genetik yang baik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif, penerapan teknologi pertanian yang modern, penggunaan pakan berkualitas tinggi, serta penerapan praktik pengelolaan yang efisien.
- (4) Kerjasama dengan peternak lokal menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan daging. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan peternak lokal, memberikan bantuan teknis, dukungan pembiayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal dalam memproduksi daging yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan.
- (5) Diversifikasi sumber protein selain daging, penting juga untuk mendorong diversifikasi sumber protein, termasuk sumber

protein nabati, untuk mengurangi tekanan terhadap sektor peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian vertikal, pengembangan tumbuhan protein alternatif, serta promosi pola makan yang seimbang.

Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan daging untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu diperhatikan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, peternak, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan pemenuhan kebutuhan.

Tabel 10 Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton)

Komoditas	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
S a p i	7,091.87	7,304.63	7,636.99	7,866.10	8,102.08	14,207.04
K e r b a u	61.18	63.02	65.88	67.86	69.89	122.56
Kuda	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.58
Kambing	783.33	806.83	843.54	868.85	894.91	1,569.23
Domba	5.19	5.35	5.59	5.76	5.93	10.40
Babi	2,348.23	2,418.68	2,528.73	2,604.59	2,682.73	4,704.18
Ayam Buras	4,815.08	4,959.53	5,185.19	5,340.75	5,500.97	9,645.98
Ayam Petelur	641.77	661.02	691.10	711.83	733.19	1,285.65
Ayam Pedaging	54,830.23	56,475.14	59,044.76	60,816.10	62,640.58	109,840.64
I t i k	104.43	107.56	112.46	115.83	119.31	209.20
Kelinci	4.30	4.43	4.63	4.77	4.91	8.61
Puyuh	9.05	9.32	9.75	10.04	10.34	18.13
Merpati	1.43	1.47	1.54	1.59	1.63	2.86
Itik Manila	41.04	42.27	44.19	45.52	46.89	82.21
Total	70,737.42	72,859.54	76,174.65	78,459.89	80,813.69	141,707.29

Tabel 11 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)

No	Jenis Telur	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam Buras	2,926.55	2,800.53	2,840.75	3,084.63	3,177.17
2	Ayam Petelur	8,137.38	6,581.97	9,398.44	9,435.03	9,718.08
3	I t i k	1,366.89	1,398.21	1,398.57	1,434.34	1,477.37
4	Puyuh	67.92	67.12	80.81	96.23	99.11
5	Itik Manila	235.25	235.47	290.00	352.34	362.91
	Jumlah	12,734.00	11,083.30	14,008.57	14,402.56	14,834.64

Struktur konsumsi telur pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 jumlah konsumsi telur mencapai 12.734,00 Ton. Pada Tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan mencapai 11.083,30 Ton. Kemudian naik signifikan atau mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022.

Pemenuhan konsumsi telur dalam rangka pembangunan IKN

Telur merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, kaya nutrisi, praktis, dan terjangkau. Kelebihan ini menjadikan telur sebagai komoditas peternakan yang penting dalam pemenuhan pangan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan dan gizi masyarakat.

Telur menjadi pilihan komoditas peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan IKN, diman telur memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Sumber protein yang berkualitas
2. Nutrisi yang lengkap, Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin (A, D, E, B12, riboflavin), mineral (zat besi, seng, selenium), asam lemak sehat, kolin, dan antioksidan.
3. Harga terjangkau,
4. Fleksibilitas dalam penggunaan, Telur dapat digunakan dalam berbagai cara dalam makanan dan masakan. Fleksibilitas ini memungkinkan variasi dalam pola makan dan memenuhi preferensi masyarakat.
5. Daya tahan yang baik (Daya simpan)
6. Sumber energi yang baik

Tabel 12 *Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN*

Jenis Telur	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
Ayam Buras	1,588.59	1,636.25	1,710.70	1,788.53	1,869.91	4,354.90
Ayam Petelur	23,532.14	24,238.10	25,340.94	26,493.95	27,699.43	64,510.06
I t i k	1,314.86	1,354.31	1,415.93	1,480.35	1,547.71	3,604.50
Puyuh	59.47	61.25	64.04	66.96	70.00	163.03
Itik Manila	322.99	332.68	347.82	363.64	380.19	885.43
Total	26,818.05	27,622.59	28,879.42	30,193.43	31,567.23	73,517.92

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Daya tampung ternak mengacu pada kapasitas produksi maksimal dari suatu kawasan atau peternakan. Pernyataan bahwa daya tampung ternak masih tinggi dapat diartikan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan populasi ternak pada suatu kawasan atau peternakan. Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkebunan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya peternakan berbasis korporasi.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis

Data populasi ternak mulai Tahun 2016-2020 tercatat kenaikan dengan rasio 1,54% untuk Sapi, 1,72% untuk Kambing, 12,93% untuk Domba, 10,76% untuk Kuda, 16,97% untuk ayam petelur, 1,96% untuk Itik, 14,49% untuk Iti Manila. Kerbau 2,26%, Ayam buras 2,08% dan Puyuh 9,91% disamping kenaikan ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan seperti Babi sebesar -0,12%, Sapi Perah sebesar -8,24%, Kelinci sebesar -8,96%. Perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	117,504	119,485	119,974	121,290	108,613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kerbau	6,157	6,194	6,552	6,539	6,490
4	Kambing	66,378	67,892	69,929	68,997	58,552
5	Domba	439	590	635	694	642
6	Babi	78,968	82,546	83,652	76,292	45,839
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Ayam Buras	4,569,169	4,372,415	4,435,205	4,815,976	5,183,873
9	Ayam Petelur	1,055,432	853,693	1,218,994	2,263,835	1,340,217
10	Ayam Pedaging	66,672,445	67,886,566	59,402,832	55,877,917	61,412,191
11	Itik	248,978	254,683	254,749	261,263	269,564

12	Kelinci	14,189	8,859	10,830	9,462	7,931
13	Puyuh	66,593	65,808	79,222	94,339	88,143
14	Merpati	4,027	4,776	5,015	5,375	5,678
15	Itik Manila	42,851	42,890	52,823	64,178	67,608

4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada Tahun 2018-2022 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 77 unit. Selain itu telah tumbuh upgrade kandang tertutup dari kandang terbuka dalam budidaya ayam potong mencapai 45%.

5. Kontribusi peran dalam pengurangan kasus stunting

Peran peternakan dalam penanganan kasus stunting pada anak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:

- a) Sumber Protein Berkualitas, Peternakan menyediakan sumber protein berkualitas tinggi seperti daging, susu, dan telur. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Konsumsi protein yang cukup membantu memperbaiki status gizi anak yang mengalami stunting dan mendorong pertumbuhan linier yang optimal.
- b) Asupan Zat Gizi Mikro, Produk hewani seperti susu dan telur mengandung zat gizi mikro penting seperti zat besi, kalsium, vitamin B12, dan vitamin A. Kekurangan zat gizi mikro ini dapat menyebabkan stunting pada anak. Dengan memperoleh sumber makanan hewani yang kaya zat gizi mikro melalui peternakan, anak-anak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
- c) Diversifikasi Pangan, Peternakan dapat membantu dalam diversifikasi pangan, yaitu memperluas variasi makanan yang tersedia bagi anak-anak. Dengan memiliki peternakan yang beragam, seperti peternakan ayam, kambing, sapi, atau ikan, keluarga dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan hewani yang memberikan nutrisi yang berbeda. Diversifikasi pangan penting untuk memastikan asupan gizi yang seimbang dan mengatasi kekurangan nutrisi yang mungkin menyebabkan stunting.

- d) Ketersediaan Pangan Lokal, Peternakan lokal dapat meningkatkan ketersediaan pangan hewani di wilayah tersebut. Ini akan mengurangi ketergantungan pada impor makanan hewani dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi keluarga dengan anggaran terbatas. Ketersediaan pangan lokal yang baik memungkinkan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang lebih segar dan berkualitas.
 - e) Edukasi dan Pengetahuan Gizi, Peternakan dapat berperan sebagai agen pendidikan dan memberikan informasi tentang manfaat gizi dan pentingnya makanan hewani dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Peternak dapat memberikan edukasi tentang nutrisi yang baik, praktik peternakan yang sehat, serta pentingnya asupan gizi yang seimbang dalam mengatasi stunting. Dengan meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat, peternakan berkontribusi pada kesadaran akan penting.
6. Kontribusi peran dalam pengurangan kemiskinan
- Peran peternakan dalam penanganan kemiskinan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:
- a) Peningkatan Pendapatan, Peternakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Dengan memiliki peternakan yang berkelanjutan dan produktif, keluarga peternak dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari penjualan produk hewani, seperti daging dan telur. Pendapatan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrim dengan memberikan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.
 - b) Pangan dan Keamanan Gizi, Peternakan dapat menyediakan sumber makanan hewani yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Konsumsi protein dan zat gizi mikro yang cukup dari produk hewani membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan keluarga. Selain itu, peternakan juga dapat membantu dalam diversifikasi pangan dengan menyediakan berbagai jenis makanan, yang membantu dalam mengatasi kekurangan nutrisi dan mencapai keamanan pangan yang lebih baik.

- c) Pemberdayaan Ekonomi, Peternakan dapat memberikan kesempatan pemberdayaan ekonomi kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dengan melibatkan keluarga dalam kegiatan peternakan, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola peternakan dengan efisien. Selain itu, melalui koperasi peternakan atau asosiasi peternak, keluarga dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, memperoleh harga yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memasarkan produk peternakan.
- d) Pemberdayaan Perempuan, Peternakan dapat memberikan peluang pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Perempuan sering kali terlibat dalam kegiatan peternakan, seperti pemeliharaan ternak, produksi makanan, atau pengolahan produk hewani. Melalui keterlibatan aktif dalam peternakan, perempuan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi mereka, memperoleh keahlian baru, dan memperkuat peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan dengan strategi peningkatan produksi dan produktivitas ternak, dan arah kebijakan yang terdiri dari optimalisasi reproduksi ternak, meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak, meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak, dan pengembangan dan penguatan kelembagaan peternak. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2024:

Tabel 14 Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Program (Rp)
Meningkatkan Peran Sub Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara		Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan	%	2,00					
	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani Peternak	Nilai	108,58	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	96,21	3.086.450.185
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11	3.703.740.222
					Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Skor	99,74	4.321.030.259
	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	Produksi Daging	Ton	76.024,70	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53	22.963.189.378
		Produksi telur	Ton	15.294,50	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	Çç;(1.234.580.074
		Produksi Ternak Lainnya	TOn	174,95	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	6.666.732.400

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2024.

Tabel 15 Review Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					81.935.083.000	02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					104.349.621.963
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					71.441.152.370	02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					86.755.691.332
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Layanan Kesekretarian	Skor	93,30		26.378.979.665	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	93,30		33.486.595.271
									Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	90		1.543.225.093	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	90		2.736.374.702
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	Smd	432.103.026	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	Smd	591.981.146
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Smd	185.187.011	3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Smd	84.568.735
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	Smd	185.187.011	3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	Smd	84.568.735
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Smd	308.645.019	3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Smd	338.274.940

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	Smd	432.103.026	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	Smd	1.636.981.146
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	%	90		21.440.659.369	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	%	90		21.744.308.586
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	Smd	20.391.266.306	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	Smd	20.391.266.306
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	493.832.030	3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	676.200.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	61.729.004	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	84.568.280
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Smd	123.458.007	3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Smd	84.568.280
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"	Laporan	1	Smd	246.916.015	3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"	Laporan	1	Smd	380.559.000
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Smd	123.458.007	3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Smd	126.830.000

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	80		617.290.037	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	80		422.843.675
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Smd	123.458.007	3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Smd	84.568.735
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	smd	246.916.015	3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	smd	84.568.735
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas)	Laporan	4	smd	246.916.015	3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas)	Laporan	4	smd	253.706.205
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	80		617.290.037	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	80		549.696.778
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Paket	3	smd	61.729.004	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Paket	3	smd	84.568.735
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	smd	185.187.011	3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	smd	84.568.735
3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	smd	185.187.011	3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	smd	126.853.103
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Smd, luarPrv	185.187.011	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	Smd, luarPrv	253.706.205

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80	smd	617.290.037	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80	smd	1.437.668.496
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)	Paket	4	Smd	30.864.502	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)	Paket	4	Smd	42.284.368
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	smd	123.458.007	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	87	smd	338.274.940
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	123.458.007	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	84.568.735
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	smd	30.864.502	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	smd	42.284.368
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd	308.645.019	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd	930.256.086
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80	smd	308.645.019	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80	Smd	872.843.674
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	smd	154.322.509	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Smd	788.274.940

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	smd	154.322.509	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Smd	84.568.735
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	smd	617.290.037	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	Smd	4.665.750.170
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	61.729.004	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Smd	84.568.735
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	277.780.517	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Smd	422.843.675
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	277.780.517	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	4.158.337.760
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80	smd	617.290.037	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80	smd	1.057.109.188
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49	smd	123.458.007	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49	smd	177.594.344

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	smd	246.916.015	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	smd	380.559.308
							3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	Smd	160.680.597
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	5	smd	246.916.015	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	5	smd	246.916.015
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	96,21		3.086.450.185	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	96,21		3.911.835.245
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		26.296.555.578			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		33.392.347.029
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	25		1.851.870.111	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	25		2.311.101.147
		Peningkatan Jumlah Unit pengolahan pupuk asal KOHE	Unit	15					Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	385.000		
		Peningkatan produksi pupuk asal KOHE	Ton	385.000					Pesentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	37,04		
		Peningkatan pemanfaatan Jumlah Biogas	%	37,04					Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	kk	625		
		Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	kk	600					Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	860	1.100.734.098	
		Jumlah Komoditas ternak yang berpotensi	Jenis	3					1.234.580.074				

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
		dan berpeluang pengeluaran											
		Peningkatan nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	860									
		Peningkatan jumlah produk unggulan peternakan yang dipromosikan	Produk	12									
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.851.870.111	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.811.101.147
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.234.580.074	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.100.734.098
3.27.02.1.0.4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Calving Rate	%	61		4.925.974.496	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Calving Rate	%	61		1.583.728.186
		Calving Interval	Bulan	17,18					Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	12,50		
		Peningkatan Akseptor IB dari Indukan	%	12,50		Jumlah bibit sapi ber-SKLB			Ekor	175		2.905.536.126	
		Peningkatan jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	175		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar			%	1,95			
		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,95		Pertumbuhan Upgrade Closed house			%	50			
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	50		Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) (Unit usaha)			Unit	113			

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
		Peningkatan pembudidaya unggas lokal	RTUP	49.000									
		Peningkatan pembudidaya Ayam Ras Layer	RTUP	190									
		Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) (Unit usaha)	Unit	108									
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	4.925.974.496	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.583.728.186
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	5.444.498.127	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.905.536.126
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	Jumlah identifikasi bahan baku pakan	Jenis	12		3.370.403.602	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	17		1.907.447.130
		Jumlah unit pengolahan pakan mini	Unit	8					Luasan HPT	Ha	1150	2.188.634.934	
		Peningkatan Jumlah Bank Pakan	Unit	17									

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
	Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luasan HPT	Ha	1150		3.111.141.787		Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi					
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	2	bru, psr, mah,kbr,smd, ppu,bpn,ktm,btg, kkr, luarPrv	3.370.403.602	3.27.02.1.05.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.907.447.130
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Ton	165.066	bru, psr, mah,kbrsmd,ppu,bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	3.111.141.787	3.27.02.1.05.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Ton	165.066	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.188.634.934
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Peningkatan Jumlah unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	29,58		370.374.022	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Jumlah unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	29,58		660.440.458
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	bru, psr, mah,kbrsmd,ppu,bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	370.374.022	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	660.440.458
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Jumlah Pengadaan Ternak	(Indukan /Bibit)	2.700		9.074.163.545	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Jumlah Pengadaan Ternak	(Indukan /Bibit)	2.700		24.146.560.195
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	800	bru, psr, mah,kbrsmd,ppu,bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	9.074.163.545	3.27.02.1.07.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	2220	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	24.146.560.195

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,74		1.234.580.074	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54		1.300.734.098
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Kawasan	134		1.234.580.074	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Kawasan	134		1.300.734.098
		Peningkatan Akses pembiayaan	Rupiah, Milyar	112,20					Jumlah Akses pembiayaan	Rupiah, Milyar	112,20		
		Peningkatan jumlah Investasi	Unit	3					Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	3		
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.234.580.074	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.300.734.098
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79		6.666.732.400	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79		6.565.464.128
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		3.703.740.222			Tingkat Pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		3.524.502.294
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut)	Kecamatan	64		1.851.870.111	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut)	Kecamatan	64		1.891.849.192
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	76,50		2.222.244.133			Tingkat kesembuhan GANGREP	%	76,50		2.602.821.376
		Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan	%	43,50					Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan	%	43,50		
									Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	20		495.330.344

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.851.870.111	3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.479.073.905
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.222.244.133	3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	30	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	412.775.287
							3.27.04.1.01.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.602.821.376
							3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	495.330.344
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	72		370.374.022	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	72		1.320.880.917
		Menurunnya resiko masuknya PHMSZ	%	3,20		1.481.496.089			Menurunnya resiko masuknya PHMSZ	%	3,20		
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	370.374.022	3.27.04.1.02.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.320.880.917

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
	Hewan dan Produk Hewan							Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM					
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.481.496.089	3.27.04.1.02.05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	330.220.229
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	23		740.748.044	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	23		419.692.414
		Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	58		555.561.033			Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	81		1.155.770.803
									Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,32		165.110.115
									Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	24,8		825.550.573
									Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/Hari	27,5		387.410.115
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	8	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	740.748.044	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	8	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	419.692.414
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bp	555.561.033	3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	462.308.321

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
	Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner			n, ktm, btg, kkr, luarPrv			Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner			bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
							3.27.04.1.03.04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	165.110.115
							3.27.04.1.03.05	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	10	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	346.731.241
							3.27.04.1.03.06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	825.550.573
							3.27.04.1.03.07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	umlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	100	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	387.410.115
							3.27.04.1.03.08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	346.731.241

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
		Penurunan jumlah pemotongan ternak sapi betina produktif	%	24,80									
3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	1	bru, psr, mah,kbrs md,ppu,bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	185.187.011							
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kejadian)	Kasus	100	bru, psr, mah,kbrs md,ppu,bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	925.935.056							
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,35		987.664.059	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,35		550.418.728
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	32,90		123.458.007	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	32,90		110.073.403
		Peningkatan unit usaha/kelp. Yang melakukan integrasi	Unit	114					Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	114		440.345.325
		Peningkatan Peran BUMN dan Swasta	%	10		493.832.030							
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kot a	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	395	bru, psr, mah,kbrs md,ppu,bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	123.458.007	3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	395	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	110.073.403

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	2	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	493.832.030	3.27.06.1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	440.345.325
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase unit usaha obat hewan yang memiliki komitmen izin usaha	%	34		370.374.022	-	-	-	-	-	-	-
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	185.187.011	-	-	-	-	-	-	-
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	1	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	185.187.011	-	-	-	-	-	-	-
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,74		3.086.450.185	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,74		4.023.794.539
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah peternak millennial	Rupiah	75		1.234.580.074	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rasio SD komoditas/ produk peternakan	rasio	1,154		385.256.934
		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	Rasio	1,156					1.326.996.107				
		Data Informasi pasar tepat waktu	%	19									
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	bru, psr, mah, kbrs md, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.234.580.074	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	385.256.934

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
							3.27.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	17	bru, psr, mah, kbr,smd, Ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.326.996.107
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	8		1.851.870.111	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	8		2.592.618.156
		Jumlah Petugas/peternak yang di latih	Orang	245									
							3.27.07.1.03.05	Sub Kegiatan Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	9	bru, psr, mah, kbr, smd,ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.541.027.665
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	8	bru, psr, mah,kbr,smd,ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.851.870.111	3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	8	bru, psr, mah, kbr, smd,ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	770.513.833
02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					6.172.900.371	02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					13.272.900.371
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	93,30		2.901.263.174	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,30		11.025.041.001
									Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	%	90		232.101.054	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	%	90		150.960.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Ppu	188.582.106	3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Ppu	150.960.000

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	80		290.126.317	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	80		141.063.293
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Ppu	58.025.263	3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Ppu	21.013.293
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Ppu	116.050.527	3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Ppu	20.000.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas)	Laporan	4	Ppu	116.050.527	3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas)	Laporan	4	Ppu	100.050.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	80		435.189.476	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	80		80.888.200
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	Ppu	290.126.317	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	Ppu	44.440.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	Ppu, Smd, luarPrv	145.063.159	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	Ppu, Smd, luarPrv	36.448.200
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		580.252.635	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		499.043.300
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	Ppu	58.025.263	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	Ppu	14.366.800

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
	gan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)						gan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)				
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Ppu	87.037.895	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Ppu	129.208.500
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Ppu	58.025.263	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Ppu	11.268.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Ppu	58.025.263	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Ppu	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Ppu	319.138.949	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Ppu	344.200.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		348.151.581	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		87.771.100
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Ppu	174.075.790	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Ppu	-
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	Ppu	174.075.790	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	Ppu	87.771.100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		580.252.635	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.953.094.860

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
	Pemerintahan Daerah							Pemerintahan Daerah					
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Ppu	58.025.263	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Ppu	2.502.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Ppu	232.101.054	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Ppu	104.545.580
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Ppu	290.126.317	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Ppu	1.846.047.280
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		435.189.476	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		8.112.220.248
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	ppu	58.025.263	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	ppu	10.343.500
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	Ppu	188.582.106	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	Ppu	352.283.100
							3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	PPU	7.749.593.648

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	ppu	188.582.106	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	ppu	-
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ekor	88,54		3.271.637.196	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ekor	88,54		2.247.859.370
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Peningkatan Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	133,70		1.799.400.458	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	133,70		997.137.670
		Peningkatan angka kelahiran	%	25,50					angka kelahiran	%	25,50		
		Peningkatan Calving Interval	Bulan	17,01					Calving Interval	Bulan	17,01		
		Peningkatan Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	0,00					Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	0,00		
		Penurunan Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,13					Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,13		
		Peningkatan Jumlah Populasi Plasma Nutfah	ST	43,59					Jumlah produksi pupuk	Ton	10		
		Peningkatan Jumlah pupuk	Ton	10		1.472.236.738			Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/polis/kg)	10.000		
		Peningkatan jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/polis/kg)	10.000		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan			Ton	1.500			
		Peningkatan Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak	Ton	1500		Jumlah PAD			Rupiah	113.000.000			
		Peningkatan produksi pakan tambahan	kg	5.314					-	-	-	-	-

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
		Peningkatan jumlah PAD	Rupiah	113.000.000					-	-	-	-	-
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	ppu	1.799.400.458	3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	ppu	997.137.670
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	ppu	1.472.236.738	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	ppu	1.250.721.700
02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					4.321.030.259	02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					4.321.030.259
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	93,30		2.592.618.156	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,30		2.540.556.050
									Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	%	90		207.409.452	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	%	90		114.840.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	168.520.180	3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	114.840.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	smd	38.889.272	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	smd	-

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
	kasi Keuangan SKPD							kasi Keuangan SKPD					
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	80		259.261.816	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	80		77.333.600
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	smd	51.852.363	3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	smd	31.610.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	smd	103.704.726	3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	smd	21.625.600
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	smd	103.704.726	3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	smd	24.098.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	80		388.892.723	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	80		209.545.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Paket	5	smd	129.630.908	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Paket	5	smd	66.400.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Ppu, Smd, luarPrv	259.261.816	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	Ppu, Smd, luarPrv	143.145.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		518.523.631	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		540.396.270

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)	Paket	4	Smd	51.852.363	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)	Paket	4	Smd	10.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	Smd	77.778.545	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	Smd	216.445.600
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Smd	51.852.363	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Smd	25.072.270
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Smd	51.852.363	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Smd	3.878.400
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Smd	233.335.634	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Smd	285.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		311.114.179	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		175.042.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	smd	155.557.089	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	smd	73.340.000
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	smd	155.557.089	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	smd	101.702.000

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		518.523.631	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.127.684.680
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Smd	51.852.363	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Smd	5.994.300
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Smd	207.409.452	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Smd	189.715.900
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	259.261.816	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	931.974.480
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		388.892.723	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		295.714.500
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	smd	51.852.363	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	smd	8.407.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	smd	168.520.180	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	smd	205.005.500

Rancangan Awal Rencana Kerja							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Lokasi	Kebutuhan Dana
							3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	smd	63.882.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	ppu	168.520.180	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	smd	18.420.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	98,68		1.728.412.104	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	98,68		1.780.474.210
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Ruang lingkup pengujian	absolut	39		1.728.412.104	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Ruang lingkup pengujian	absolut	39		1.780.474.210
		Peningkatan Kepuasan pelanggan	Skor	84				Peningkatan Kepuasan pelanggan	Skor	84			
		Peningkatan Jumlah PAD	Rupiah	190.000.000				Peningkatan Jumlah PAD	Rupiah	190.000.000			
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	400		1.728.412.104	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	400		1.780.474.210

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Tabel 16 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kec. Kota Bangun Kab. Kukar (Kelompok Tani "Suka Maju")	Permohonan Bantuan Ternak Bebek Telur dan Pelatihan		Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian & Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
2	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kec. Muara Muntai Kab. Kukar (Kelompok Peternakan "Tanjung Harapan Baru")	Permohonan Bantuan Hewan Ternak Sapi		Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian & Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Teluk Muda Kec. Kenohan, Kab Kukar (Kelompok Tani "Ingin Maju")	Permohonan Bantuan Sapi Pejantan (Pemacek)		Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, BPP. Kec. Kenohan, Rekom Dinas Pertanian & Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Tubuhan Kec. Kenohan, Kab Kukar (Kelompok Tani "Pulau Sakkan")	Permohonan Bantuan Sapi Pejantan (Pemacek)		Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, BPP. Kec. Kenohan, Rekom Dinas Pertanian & Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan, Kab. Kukar (Kelompok Tani "Danau Payang I")	Permohonan Bantuan Ternak Kambing		Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, BPP. Kec. Kenohan, Rekom Dinas Pertanian & Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dan Prasarama	Desa Kelinjau Ilir Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim (Kelompok Tani "Kelinjau Putra Bersaudara")	Permohonan Bantuan Bibit Sapi, Pemagaran Lokasi, Rumah Pemeliharaan dan Rumah Tempat Tinggal		Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Ancalong, Rekom PPL Setempat, Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
7	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Long Poq Baru Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim (Kelompok Tani "Agribisnis")	Permohonan Bantuan Pembelian Ternak Sapi Bali Produktif		Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Ancalong, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Terdaftar SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota No. Reg :
8	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Sumber Sari Kec. Long Mesangat Kab. Kutim (Kelompok Tani "Marga Rahayu")	Permohonan Bantuan Bibit Sapi		Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Long Mesangat, Rekom PPL Setempat, Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Terdaftar SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota No. Reg : 16/001-012/Bapeluh
9	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Sumber Sari Kec. Long Mesangat Kab. Kutim (Kelompok Tani "Bina Marga")	Permohonan Bantuan Bibit Sapi		Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Long Mesangat, Rekom PPL Setempat, Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Terdaftar SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota No. Reg : 15/001-012/Bapeluh

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
10	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim	Permohonan Ternak Sapi Pejantan	20 Ekor	Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. BPPP Kec. Muara Bengkal, Rekom PPL Setempat, Akta Notaris, Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
11	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kampung Kasai Kec. Pulau Derawan Kab. Berau (Kelompok Tani "Kartika Bersama Jaya")	Permohonan Bibit Ternak Sapi		Rekomendasi Berasal Dari Akta Notaris, Belum Ada Rekom Dinas Pertanian & Peternakan Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota

Table 17 Usulan Langsung (Aspirasi) Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Nama Kelompok Tani/Ternak	Usulan Permohonan	Usulan Volume (Ekor/unit)	Alamat		
						Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	765669	04/04/2023	Usaha Bersama	Permohonan Bnatuan Ternak sapi	35	Paser	Long ikis	In. Nuri Rt.06 Desa Kayungo Sari
2	770552	10/04/2023	Bantau Mandiri	Permohonan Bnatuan Ternak sapi		Berau	Gunung Tabur	Kampung Melati Jaya,
3	770553	10/04/2023	Bersama Sejahtera	Permohonan Bnatuan Ternak Kambing Etawa dan Mesin Chopper	125	Berau	Sambaliung	RT. 03 KM. 04 Mangkajang
4	770559	10/04/2023	Sepakat Jaya	Permohonan Bnatuan Ternak sapi	32	Berau	Sambaliung	Suaran RT.02
5	780415	10/04/2023	Harapan Mekar	Permohonan Bnatuan Ternak Kambing dan Kandang	85	Kutai Kartanegara	Marangkayu	desa perangat selatan
6	779382	10/04/2023	-	Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Peternakan (berupa KOHE/pupuk)	10	Kutai Timur	Sangatta Utara	Sangatta Utara
7	779384	10/04/2023	-	Permohonan Bnatuan Ternak sapi	165	Kutai Timur	Sangatta Utara	Sangatta Utara
8	780545	10/04/2023	Maju Sejahtera Parama	Pembangunan Miniranch	1	Kutai Barat	Barong Tongkok	Ngenyan Asa
9	780548	10/04/2023	Radak Sangokng	Pembangunan Miniranch	1	Kutai Barat	Jempang	Muara Tae
10	810095	10/04/2023	Usaha Pemuda Berkarya	Permohonan Bantuan Pembuatan Kandang Kambing	1	Kutai Kartanegara	Muara Badak	Batu-Batu

Table 18 Usulan Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2023

No	Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Nama Kelompok Tani/Ternak	Usulan Permohonan	Usulan Volume (Ekor)	Alamat		
							Kabupaten /Kota	Kecamatan	Kelurahan /Desa
1	435832	26/03/2023	Herliana Yanti	Sumber Usaha	Permohonan Ternak Ayam	1000	Paser	Paser Belengkong	Desa Suliliran Baru Rt.15
2	438665	27/03/2023	Herliana Yanti	Sri Rejeki	Permohonan Ternak Sapi Bali	25	Paser	Long Kali	RT.03 Desa Mendik Makmur
3	438706	27/03/2023	Herliana Yanti	Marhain Sari	Permohonan Ternak Sapi Bali	25	Paser	Kuaro	Desa Klempang Sari Rt.04
4	438711	27/03/2023	Herliana Yanti	Karya Taka	Permohonan Ternak Sapi	25	Paser	Kuaro	Desa Modang Rt.05
5	438712	27/03/2023	Herliana Yanti	Karya Bersama	Permohonan Ternak Sapi	25	Paser	Paser Belengkong	Desa Laburan Baru
6	463735	04/04/2023	Sukmawati	Sumber Rejeki	Permohonan Ternak Sapi	30	Paser	Kuaro	Desa Kendarom RT.10
7	463768	04/04/2023	Sukmawati	Sabar Subur	Permohonan Ternak Sapi	20	Paser	Kecamatan Long Ikis	Desa Olung RT.11
8	464447	04/04/2023	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Kambing Lestari	Permohonan Bantuan Dana pengembangan Ternak Kambing & Kandang	50	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	Desa Jembayan Tengah Jalan Rochi Tudungan RT. 006
9	464608	04/04/2023	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Badak Makmur Jaya	Permohonan Ternak Sapi	30	Kutai Kartanegara	Muara Badak Kab.	Desa Muara Badak Ulu Jln. Kenari II RT. 012
10	464656	04/04/2023	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Makmur Sejati	Permohonan Bantuan Ternak Kambing & Kandang	80	Kutai Kartanegara	Kec. Muara Badak	Desa Muara Badak Ulu Jln. Poros Muara Badak - Samarinda RT. 017
11	464699	04/04/2023	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Mandiri Makmur	Permohonan Bantuan Bibit Sapi, Kandang, Mesin Pencacah dan Obat-obatan	75	Kutai Kartanegara	Muara Badak	Desa Muara Badak Ulu Jalan Kemakmuran Raya Badak Makmur RT.10
12	469577	10/04/2023	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Desa Loa Duri Ilir	Bantuan bibit sapi, kambing, bebek, ayam Melalui dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	Kutai Kartanegara	Loa Janan	Desa Loa Duri Ilir Jln.Petinggi Umar Kampung Jawa RT. 24/05
13	475257	06/04/2023	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	Mandiri I	(Permohonan Bantuan Bibit Sapi)	38	Kutai Timur	Teluk Pandan	Desa Suka Rahmat Jl. Poros Bontang-Samarinda KM 5 RT 06 Dusun Sungai Api Api
14	475460	06/04/2023	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	Sekumpul Raya	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Bali	55	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Desa Loa Raya RT 3 No 27

No	Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Nama Kelompok Tani/Ternak	Usulan Permohonan	Usulan Volume (Ekor)	Alamat		
							Kabupaten /Kota	Kecamatan	Kelurahan /Desa
15	475809	06/04/2023	H. Saefuddin Zuhri, S.E, M.M	Tunas Harapan Mandiri	Permohonan Bantuan Pengembangan Ternak Kambing	36	Samarinda	Palaran Kota	Kel. Bukuan Jl. Pangeran Diponegoro RT 23
16	476448	06/04/2023	Ismail , S.T	Sempayang Jaya Muda	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	37	Kutai Timur	Teluk Pandan	Desa Telu Pandan jl. poros - Bontang Sangatta
17	476538	06/04/2023	Ismail , S.T	Massapalla	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	20	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Desa Sangatta Selatan jln. Pertamina KM 01
18	476604	06/04/2023	Ismail , S.T	Sumber Makmur	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi	20	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Desa Sangatta Selatan Jln. Pertamina KM.01
19	476754	06/04/2023	Ismail , S.T	Agribisnis	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	20	Kutai Timur	Muara Ancalong	Desa Long Poq Baru
20	476802	06/04/2023	Ismail , S.T	Agribisnis	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	2	Kutai Timur	Muara Ancalong	Desa Long Poq Baru
21	479291	06/04/2023	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	Bersama Kita Maju	Permohonan bantuan ternak kambing, kandang dan obat-obatan	40	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Desa Separi Jalan Merdeka RT 12 Dusun Sungai Separi
22	479932	07/04/2023	Ismail , S.T	Sumber Rezeki Abadi	Permohonan Ternak Sapi Dan Kandang	100	Kutai Timur	Bengalon	Desa Tepian Indah
23	479950	07/04/2023	Ismail , S.T	Tunas Harapan	Permohonan Ternak Sapi	75	Kutai Timur	Teluk Pandan	Desa Danau Redan jl.Danau Redan II KM.2 RT.005
24	480351	07/04/2023	Ismail , S.T	Pada Elo	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi Bali Betina	45	Kutai Timur	Muara Ancalong	Desa Muara Dun Jl. PT.EX OTP KM 03 RT.006
25	480353	07/04/2023	Ismail , S.T	Pada Elo	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi Bali Jantan	2	Kutai Timur	Muara Ancalong	Desa Muara Dun Jl. PT.EX OTP KM 03 RT.006
26	480358	07/04/2023	Marthinus, S.T, M.Si	Bumi Hijau	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Bali dan kandang	25	Kutai Barat	Long Iram	Long Iram Kota Jl. Dr. Soewondo
27	480379	07/04/2023	Ismail , S.T	Mesa Kada	Permohonan Bantuan Bibit Ternak sapi Jantan	4	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Desa Pinang Raya Jl. Poros Sangatta-Bontang RT 00 KM 05
28	480387	07/04/2023	Ismail , S.T	Lajau Indah	Permohonan Bantuan Ternak sapi Pejantan	20	Kutai Timur	Muara Bengkal	Desa Benua Baru Jaya Muda Rt 11

No	Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Nama Kelompok Tani/Ternak	Usulan Permohonan	Usulan Volume (Ekor)	Alamat		
							Kabupaten /Kota	Kecamatan	Kelurahan /Desa
29	480397	07/04/2023	Ismail , S.T	Mesa Kada	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi Betina	21	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Desa Pinang Raya Jl. Poros Sangatta-Bontang RT 00 KM 05
30	481000	08/04/2023	Ismail , S.T	Kartika Bersama Jaya	Permohonan Bibit Ternak Sapi Betina	19	Berau	Pulau Derawan	RT 01, Kampung Kasai
31	481003	08/04/2023	Ismail , S.T	Kartika Bersama Jaya	Permohonan Bibit Ternak Sapi Jantan	6	Berau	Pulau Derawan	RT 01, Kampung Kasai
32	482532	10/04/2023	Sukmawati	Karang Tumaritis	Permohonan BantuanTernak Sapi	60	Paser	Paser Belengkong	Desa Laburan Baru
33	482555	10/04/2023	Nidya Listiyono, S.E	Krida Karya Utama	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Bali dan kandang	30	Samarinda	Samarinda Utara	jl. Magelang RT 19 Kel. Lempake
34	482700	10/04/2023	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Tunas Harapan Mandiri	Proposal Pengembangan Ternak Kambing	32	Samarinda	Palaran Kota	Jl. Diponegoro RT 23 Kel. Bukuan
35	482717	10/04/2023	Ismail , S.T	PADAIDI	Permohonan Bantuan Sapi	25	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangima Lama Desa Teluk Singkama
36	482744	10/04/2023	Ismail , S.T	Bina Warga	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	41	Kutai Timur	Karangan	Jl. Batu Bara RT.09 Desa Pengadaan
37	483279	10/04/2023	H. Andi Harahap, S.Sos		Penyediaan Ternak Sapi / Kambing / Unggas	500	Seluruh kecamatan, Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh kecamatan, Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh kecamatan, Provinsi Kalimantan Timur
38	483475	10/04/2023	Ismail , S.T	Kajang Sejahtera	Permohonan Bantuan Penggemukan Sapi	25	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Jln. Kampung Kajang RT.05 RW.06 Kel. Singa Geweh
39	483502	10/04/2023	Ismail , S.T	Karya Utama	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	36	Kutai Timur	Kaliorang	Jl. Poros RT 007/02 Desa Selangkau
40	481142	08-04-2023	Ir. Seno Aji, M.Si	Rukun Santoso	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	25	Kutai Kartanegara	Sebulu	Dusun Sinar Harapan RT 007 Desa Tanjung Harapan
41	482444	10/04/2023	Ir. Seno Aji, M.Si	Anugrah Ilahi	Permohonan Bantuan Ternak Kambing	28	Kutai Kartanegara	Sangasanga	Jawa
42	482445	10/04/2023	Ir. Seno Aji, M.Si	Bayumas	Permohonan Bantuan Ternak Sapi		Kutai Kartanegara	Tenggarong	Bukit Biru
43	483513	10/04/2023	Ir. Seno Aji, M.Si	Mitra Utama	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	20	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Loa Pari
44	483518	10-04-2023	Ir. Seno Aji, M.Si	Sumber Rezeki	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	30	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	Sido Rejo
45	483532	10-04-2023	Ir. Seno Aji, M.Si	Maju Bersama	Permohonan Bantuan Ternak Sapi	20	Kutai Kartanegara	Sebulu	Sanggulan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mencermati Rencana Kerja Pemerintah 2024, dengan tema “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, maka untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tersebut maka Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam lima program prioritas yaitu:

- Menjaga Keberlanjutan Peningkatan Produksi/Produktivitas Komoditas Prioritas serta Berbasis Kawasan
- Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal
- Penguatan Rantai Pasok, Logistik Pangan, dan Pangan Keluarga
- Penguatan Food Estate dan Korporasi Petani
- Pengembangan Smart Farming/Integrated Farming Dan Digitalisasi Pertanian
- Merdeka Ekspor Dan Milestone Gerakan 3 Kali Ekspor (Grati eks)

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2024 sebesar 465,15 ribu ton dan target produksi daging ayam tahun 2024 sebesar 3,97 ton. Target tersebut merupakan penyediaan protein hewani.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta bibit dan benih.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Daya Saing dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2024 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Peternak melalui Korporasi Peternak untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan”.
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
 - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
 - b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
 - c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan
 - d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam

daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan

- e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan
- f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan periode 2024-2026. Rencana Kinerja Tahun 2024 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

Tabel 19 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Peran Sub Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)	2,00
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja (Poin) • Indek Kepuasan Masyarakat (Poin) 	78,50 85,00

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran rencana kerja tahun 2024 yaitu dalam rangka meningkatnya kesejahteraan peternak dan meningkatnya produksi pangan asal hewan khususnya daging, telur dan produksi aneka ternak lainnya dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kepuasan masyarakat, maka indikator sasaran rencana kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Peternak (NTP)	108,58
2	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	<u>Produksi (Ton):</u> - Daging - Telur - Ternak Lainnya	76.024,70 15,294.50 174,95
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin) • Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 	80,14 90,50

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan

akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik dan peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang

Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

”Korporasi Peternak wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan Yang Berdaulat, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”

Korporasi peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewan yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai produsen utama produk peternakan seperti daging, susu, dan telur, korporasi peternakan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan asal hewan di dalam negeri, serta menghasilkan produk-produk yang dapat diekspor ke luar negeri.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap Tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 3 Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provisisi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDH Tumbuhan dan Mikroorganisme
 - c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan
 - e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan:
 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
 - Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM
 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan
 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
5. Program Perizinan Pertanian
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dala Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Fasilitasi Pemenihan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawanan, meliputi sub kegiatan:
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani

Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang harus dijabarkan menjadi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangannya. Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 81.935.083.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD tahun 2024, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2024, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2024. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2024 pada table 19

Table 21 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					104.349.621.963	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur			107.107.243.000
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					86.755.691.332	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			85.865.796.843
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	93,30		33.486.595.271	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	95,17	32.121.103.619
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	90		2.736.374.702	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	92	2.134.209.557
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	591.981.146	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	746.973.345
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Smd	84.568.735	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	106.710.478
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	smd	84.568.735	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	106.710.478

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	338.274.940	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	426.841.911
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.636.981.146	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	746.973.345
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Score	90		21.744.308.586	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Score	91	23.157.423.480
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	Smd	20.391.583.026	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	21.450.055.834
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	676.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	853.683.823
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Smd	84.568.280	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	106.710.478
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Smd	84.568.280	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	106.710.478

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	Smd	380.559.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	480.197.150
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Smd	126.830.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	160.065.717
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	80		422.843.675	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	83	533.552.389
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Smd	84.568.735	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	106.710.478
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Smd	84.568.735	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	106.710.478
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Smd	253.706.205	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	320.131.434
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	80		549.696.778	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	83	693.618.106
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Smd	84.568.735	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	106.710.478
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Smd	84.568.735	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	106.710.478

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	Smd	126.853.103	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	160.065.717
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	Smd	253.706.205	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	320.131.434
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		1.437.668.497	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83	1.814.078.124
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Smd	42.284.368	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	53.355.239
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	87	Smd	338.274.940	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34	426.841.911
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Smd	84.568.735	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	106.710.478
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Smd	42.284.368	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	53.355.239
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	930.256.086	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.173.815.256
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		872.843.674	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83	533.552.389

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Smd	788.274.940	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	426.841.911
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Smd	84.568.735	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	106.710.478
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.522.237.231	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83	1.920.788.601
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Smd	84.568.735	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	106.710.478
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Smd	422.843.675	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	533.552.389
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Smd	4.158.337.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.280.525.734
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		1.057.109.189	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83	1.333.880.973
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49	Smd	177.594.344	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49	224.092.003
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	Smd	380.559.308	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	480.197.150

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	Smd	160.680.597	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	202.749.908
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	5	Smd	338.274.940	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	426.841.911
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		33.392.347.029	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88,00	28.975.399.825
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	96,21		3.911.835.245	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97,29	3.894.542.987
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	25		2.811.101.147	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	27,00	2.336.725.792
		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	385.000			Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	410.000	
		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	37,04			Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	47,62	
		Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	600			Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	660	
		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	860		1.100.734.098	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	920	1.557.817.195

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.811.101.147	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4,00	2.336.725.792
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.100.734.098	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1,00	1.557.817.195
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Calving Rate	%	61		1.583.728.186	Persentase Calving Rate	%	61,5	7.290.584.472
		Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	12,5			Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13	
		Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	175			Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	225	
		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,95		2.905.536.126	Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,85	3.084.478.046
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	50			Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	60	
		Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	108			Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	119	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.583.728.186	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	7.290.584.472

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.905.536.126	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	3.084.478.046
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	17		1.907.447.130	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	30	3.645.292.236
		Luasan HPT	Ha	1150		2.188.634.934	Luasan HPT	Ha	1225	4.206.106.426
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.907.447.130	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	2	3.645.292.236
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Ton	165.066	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.188.634.934	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Ton	168.367	4.206.106.426
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	29,58		660.440.458	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	47,3	934.690.317
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	660.440.458	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	934.690.317
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	(Indukan/Bibit)	2700		24.146.560.195	Jumlah Pengadaan Ternak	(Indukan/Bibit)	4700	9.814.248.328

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	2220	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	24.146.560.195	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1300	9.814.248.328
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54		1.300.734.098	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,72	1.557.817.195
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	134		1.300.734.098	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	147	1.557.817.195
		Jumlah Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	107			Jumlah Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	120	
		Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	3			Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	4	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.300.734.098	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1.557.817.195
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79		6.565.464.128	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,41	8.412.212.852
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		3.524.502.294	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,82	4.673.451.585
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	64		1.891.849.192	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	68	2.336.725.792
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	76,5		2.602.821.376	Tingkat kesembuhan GANGREP	%	80	2.804.070.951
		Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	43,5			Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	45,8	

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	20		495.330.344	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	22,5	701.017.738
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.479.073.905	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	1.518.871.765
3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	30	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	412.775.287	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	35	817.854.027
3.27.04.1.01.05	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.602.821.376	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Laporan	12	2.804.070.952
3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	495.330.344	Jumlah kader zoonosis	Orang	60	701.017.738
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	72		1.320.880.917	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	80	1.518.871.765
		Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	3,2		330.220.229	Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	2,85	817.854.027

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.02.04	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.320.880.917	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1.518.871.765
3.27.04.1.02.05	Sub Kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	330.220.229	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2	817.854.027
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	23		419.692.414	Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	36	934.690.317
		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	81		1.155.770.803	Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	86	1.635.708.055
		Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,32		165.110.115	Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,41	233.672.579
		Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	24,8		825.550.573	Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	23,5	1.168.362.896
		Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/hari	27,5		387.410.115	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/hari	30,5	233.672.579

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	8	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	419.692.414	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	13	934.690.317
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	462.308.321	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	13	654.283.222
3.27.04.1.03.04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	165.110.115	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	233.672.579
3.27.04.1.03.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	10	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	346.731.241	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	10	490.712.416
3.27.04.1.03.06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	825.550.573	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	1.168.362.896
3.27.04.1.03.07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	umlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	100	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	387.410.115	umlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	100	233.672.579

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.03.08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	346.731.241	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	2	490.712.416
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	58		495.330.344	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	60	701.017.738
3.27.04.1.04.03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	50	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	495.330.344	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	50	701.017.738
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,35		550.418.728	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,59	778.908.597
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	32,90		110.073.403	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	65,80	155.781.719
		Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	114		440.345.325	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	126	623.126.878

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	395	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	110.073.403	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	790	155.781.719
3.27.06.1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	440.345.325	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	623.126.878
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,74		4.023.794.539	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,73	5.452.360.182
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rasio SD komoditas/ produk peternakan	rasio	1,154		385.256.934	Rasio SD komoditas/ produk peternakan	rasio	1,146	545.236.018
		Persentase jumlah peternak millennial	%	75		1.326.996.107	Persentase jumlah peternak millennial	%	100	1.635.708.055
		Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49190			Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49310	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	385.256.934	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	545.236.018
3.27.07.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	17	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.326.996.107	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	15	1.635.708.055
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	8		2.311.541.498	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	13	3.271.416.109

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.07.1.03.05	Sub Kegiatan Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	9	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.541.027.665	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22	2.180.944.073
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	8	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	770.513.833	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	13	1.090.472.036
02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					13.272.900.371	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			7.789.085.975
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	93,3		11.025.041.001	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	95,17	3.660.870.408
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	90		150.960.000	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	91	292.869.633
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	ppu	150.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	237.956.577
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	54.913.056
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	80		141.063.293	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	83	366.087.041
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	ppu	21.013.293	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	73.217.408

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	ppu	20.000.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	146.434.816
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	ppu	100.050.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	146.434.816
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	80		80.888.200	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	83	549.130.561
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	ppu	44.440.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	366.087.041
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	ppu, smd, bpn, luarprov	36.448.200	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	183.043.520
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		499.043.300	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83	732.174.082
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	ppu	14.366.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	73.217.408
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	ppu	129.208.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	109.826.112
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	ppu	11.268.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	73.217.408

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	ppu	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	73.217.408
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	ppu	344.200.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	402.695.745
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		87.771.100	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83	439.304.449
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	ppu	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	219.652.224
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	ppu	87.771.100	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	219.652.224
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.953.094.860	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83	732.174.082
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	ppu	2.502.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	73.217.408
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	104.545.580	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	292.869.633
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	1.846.047.280	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	366.087.041

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		435.189.476	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83	549.130.561
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	ppu	58.025.263	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	73.217.408
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	ppu	188.582.106	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	237.956.577
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	PPU	7.749.593.648				
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	Ppu	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	237.956.577
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	88,54		2.247.859.370	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	98,73	4.128.215.566
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	133,7		997.137.670	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	194	2.270.518.562
		angka kelahiran	%	25,50			angka kelahiran	%	26,10	
		Calving Interval	Bulan	17,01			Calving Interval	Bulan	16,66	

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
	Kewenangan Provinsi	Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	0,00		1.250.721.700	Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	0,05	1.857.697.005
		Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,13			Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,05	
		Jumlah produksi pupuk	Ton	10			Jumlah produksi pupuk	Ton	20	
		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols/kg)	10.000			Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols/kg)	15.000	
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1.500			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1.800	
		Jumlah PAD	Rupiah	113.000.000			Jumlah PAD	Rupiah	120.000.000	
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	ppu	997.137.670	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	2.270.518.562
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	ppu	1.250.721.700	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	1.857.697.005
02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					4.321.030.259	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			13.452.360.182
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	93,30		2.540.556.050	Indeks Layanan Kesekretarian	Indeks	95,17	11.271.416.109
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	90		114.840.000	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	91	261.713.289

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	smd	114.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	212.642.047
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	49.071.242
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	80		77.333.600	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	83	327.141.611
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	smd	31.610.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	65.428.322
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	smd	21.625.600	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	130.856.644
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	smd	24.098.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	130.856.644
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	80		209.545.000	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score		490.712.416
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	smd	66.400.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	163.570.805
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	smd, bpn, luarprov	143.145.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	327.141.611

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	80		540.396.270	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83	588.854.900
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	smd	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	65.428.322
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	smd	216.445.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	98.142.483
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	smd	25.072.270	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	65.428.322
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	smd	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	65.428.322
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd	285.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	294.427.450
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	80		175.042.000	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83	8.392.569.933
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	smd	73.340.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	196.284.967
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	8.000.000.000

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	smd	101.702.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	196.284.967
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.127.684.680	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83	654.283.222
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	5.994.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	65.428.322
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	189.715.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	261.713.289
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	931.974.480	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	327.141.611
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80		295.714.500	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83	556.140.739
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	smd	8.407.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	65.428.322
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	smd	205.005.500	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67	212.642.047
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	smd	63.882.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	65.428.322

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2024						Perkiraan Maju Tahun 2025			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	smd	18.420.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	65.428.322
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	smd	168.520.180	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	212.642.047
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	98,68		1.780.474.210	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	99,18	2.180.944.073
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	39		1.780.474.210	Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	45	2.180.944.073
		Nilai Kepuasan pelanggan	score	84			Nilai Kepuasan pelanggan	score	84	
		Jumlah PAD	Rupiah	190.000.000			Jumlah PAD	Rupiah	212.000.000	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	400	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.780.474.210	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500	2.180.944.073

BAB IV P E N U T U P

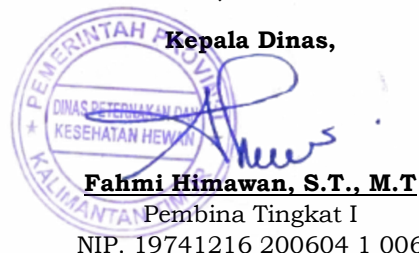
Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, sebagai upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja. Kemudian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juni 2023

Kepala Dinas,


Fahmi Himawan, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19741216 200604 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2.
Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten/Kota

NO	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember																							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																								
A. Penyusunan RKPD dan Renja-SKPD (s/d Rancangan Akhir)																																																																									
	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota	■	■	■	■																																																																				
	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota					■	■	■	■																																																																
	Musrenbang desa/kelurahan					■	■	■	■	■																																																															
	Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD					■	■	■	■	■																																																															
	Musrenbang Kecamatan					■	■	■	■	■																																																															
	Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota					■	■	■	■	■	■																																																														
	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota					■	■	■	■	■																																																															
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota					■	■	■	■	■																																																															
	Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																										
B. Penetapan perkara RKPD dan Renja SKPD																																																																									
	Penetapan perkara RKPD kabupaten/kota																																															■	■																								
	Penetapan Renja SKPD kabupaten/kota																																															■	■																								
C. Penyusunan KUA dan PPAS																																																																									
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS																																															■	■																								
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH																																															■	■																								
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD																																															■	■	■	■																						
	Pembahasan KUA dan PPAS																																															■	■	■	■	■																					
	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS																																															■	■	■	■																						
D. Penyusunan RAPBD																																																																									
	Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD																																															■	■																								
	Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD																																															■	■																								
	Penyusunan RKA-SKPD																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	Penyempurnaan RKA-SKPD																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	Penyiapan Raperda APBD																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
E. Pembahasan dan Penetapan APBD																																																																									
	Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD																																															■	■																								
	Pembahasan Raperda APBD																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH																																															■	■																								
	Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD kabupaten/kota																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi																																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	Penetapan Perda tentang APBD																																															■	■																								

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T., M.T
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19741216 200604 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax.
736228
Samarinda 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 050 / 81 / DPKH-I

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 2024
PEMBANGUNAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a) bahwa Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b) agar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2024 dapat tersusun, maka perlu ditetapkan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja;
- c) bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim penyusunan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Memperhatikan : DPA-SKPD Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur No. : 3-27.0-00.0-00.02.01 tanggal 4 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 adalah mengkompilasi dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalimantan Timur, Rencana Strategis Pembangunan Kalimantan Timur, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Nasional, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaran Kerja Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

Kepala Dinas,



Fahmi Himawan, S.T., M.T
Pembina Tingkat I

NIP. 19741216 200604 1 006

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 050 / 81 / DPKH-I
 Tanggal : 23 Juni 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan dalam T I M
1.	<u>Fahmi Himawan, S.T., M.T</u> NIP. 19741216 200604 1 006	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggung Jawab
2.	<u>Fadli S, S.Sos.M.Si</u> NIP. 19741207 199403 1 003	Sekretaris	Ketua
3.	<u>H. Rofik, S.Pt</u> NIP. 19791017 200903 1 002	Kasubag Perencanaan Program	Sekretaris
4.	<u>Sahariminah</u> NIP. 19650823 199003 2 004	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
5.	<u>Delsi Isyawati, SE</u> NIP. 19751225 200701 2 016	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
6.	<u>Meliana, SE</u> NIP. 19810525 200901 2 001	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
7.	<u>Isa Prahatino, S.Pt</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
8.	<u>Hendy Darmawan, S.Pt</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
9.	<u>Yogi Gunara Ryana, SE</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
10.	<u>Nisa Nur Istiqomah, S.Pt</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
11.	<u>M. Granit Ady Wirasisya, M.H.I</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
12.	<u>Nurul Khairia, S.Hut</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota

Kepala Dinas,


Fahmi Himawan, S.T., M.T
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19741216 200604 1 006

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009